



KORAN	HAL
Haluan	1&2
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulan																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			

TERIMA LHP: Dari kiri ke kanan, Wabup Pessel Rudi Hariyansyah, Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Arif Agus dan Ketua DPRD Pessel Ermizen, Jumat (12/5).



Pessel Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-turut



Painan, Padek—Upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) melalui semua perangkat daerah (PD) dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset,

► Baca *Pessel*...Hal 2

Pessel Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-turut

Sambungan dari hal. 1

kembali diganjar predikat Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Sumbar, Jumat (12/5). Predikat WTP ini atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

LHP itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Arif Agus kepada Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah di Aula Perwakilan BPK RI di Padang. Usai menerima penghargaan itu, Rudi Hariyansyah menjelaskan, opini WTP yang kembali diterima itu adalah yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. "Penghargaan Opini WTP dari BPK RI ini merupakan hasil kerja keras yang dilakukan selama ini," katanya.

Dia menyampaikan, tidak mudah untuk mendapatkan opini WTP. Sebab, membutuhkan keseriusan, usaha, dan ker-



SALING DUKUNG: Wabup Pessel Rudi Hariyansyah, bersama Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Arif Agus, dan Ketua DPRD Pessel Ermizen, foto bersama dengan rombongan Pemkab Pessel.

ja keras dari semua lini. Terutama sekali dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset.

berharap opini WTP yang telah diraih ini dapat untuk terus dipertahankan. Bahkan lebih ditingkatkan lagi. Jangan terlena dengan prestasi yang sudah diraih. Tapi tunjukkanlah keseriusan dan kerja keras dalam mengelolah keuangan dan aset," tekannya.

Dia menambahkan, berkat sinergitas yang baik diantara

semua pihak, termasuk DPRD sehingga daerah itu berhasil mempertahankan Opini WTP tersebut. "Dari itu saya memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat daerah yang telah dilakukan selama ini," ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Arif Agus dalam kesempatan itu mengatakan, Pessel termasuk dalam kategori 3 besar dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan skor 80,57 persen.

"Secara keseluruhan, pemerintahan kabupaten/kota yang hadir saat ini perlu menindaklanjuti beberapa permasalahan yang ada," katanya. - Permasalahan itu diantaranya, papar Arif, penatausahaan kas dan aset yang belum tertib, kelebihan pembayaran honorarium, belanja BBM yang didukung bukti yang sah, perjalanan dinas, volume pekerjaan konstruksi dan keterlambatan pembangunan gedung.

Ketua DPRD Pessel Ermizen yang juga hadir pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumbar dan para auditor yang secara profesional menjalankan tahapan pemeriksaan. "Kita berharap Pemkab Pessel tetap konsisten mempertahankan opini ini. Dan tentunya tetap serius menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP ini," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bada-

n Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pessel Hellen Hesmeita Sari mengatakan, ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Hasil yang diraih ini menjadi bukti bahwa kita serius dan berkomitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual laporan keuangan," jelasnya.

Sedangkan Kepala Inspektur Daerah Pessel Rusdianto menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pesisir Selatan dinilai baik untuk tahun anggaran 2022. "Pemeriksaan BPK atas LKPD ini merupakan pemeriksaan mandatori bertujuan untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan," timpalnya. (yon)